

NOTULA RAPAT PIMPINAN TERBATAS
Jumat, 16 Januari 2015 - Ruang Sidang Sekretaris Jenderal
(Gedung C Kemendikbud Lantai 2)
Undangan Nomor 5155/A/TU/2015 Tanggal 14 Januari 2015

Pimpinan Rapat : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Undangan : 1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Sekretaris Unit Utama;
3. Para Staf Ahli;
4. Kepala Biro Umum;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.
Waktu Rapat : Mulai pukul 16.15 WIB dan berakhir pukul 18.30 WIB
Agenda Rapat :
1. Pembahasan Rapat Kerja Komisi X DPR RI;
2. Lain-Lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka rapat pada pukul 16.15 WIB, dan memberikan pengantar bahwa tujuan rapimtas ini adalah untuk membahas persiapan raker dengan DPR pada hari Rabu, 21 Januari 2014, pukul 14.00 WIB, kemudian Mendikbud mempersilakan Sekretaris Jenderal untuk memimpin pembahasan rapat.

Sebelum menyampaikan agenda rapat, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa tim Sekretariat Jenderal selaku tim seleksi anggota LSF dan tenaga sensor film dipanggil oleh Komisi I DPR RI, pada hari Selasa, 20 Januari 2015 pukul 10.00 WIB untuk menjelaskan mekanisme seleksi dan menyatakan kesiapannya. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal melanjutkan pembahasan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Rapat Kerja Komisi X DPR RI

Agenda yang akan dibahas dalam Raker DPR adalah sebagai berikut:

A. Rancangan Renstra Kemendikbud 2015-2019

a. Sekretaris Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015 melalui Perpres No. 2/2015.
- 2) Kemendikbud harus membuat renstra sesuai dengan RPJMN, tidak boleh melenceng, dan ditetapkan paling lama 3 bulan setelah RPJMN ditetapkan sesuai dengan Permen Bappenas No. 5 Tahun 2014.
- 3) Sekretaris Jenderal meminta para pimpinan unit utama melengkapi data jumlah/angka pada indikator capaian yang masih kosong.
- 4) Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa penyusunan renstra adalah hak dan otoritas pemerintah, dan sifatnya ke DPR hanya memberikan informasi. Peranan DPR adalah memberikan usulan atau rekomendasi, namun keputusan akhir berada di Kemendibud.

b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:

- 1) Kepala BPSDMPK dan PMP menyampaikan bahwa:
 - a) Untuk pergeseran orientasi ke kualitas pendidikan, maka kualitas lulusan menjadi penting.
 - b) Saat ini, APK tinggi belum menggambarkan kondisi kualitas lulusan pada jenjang pendidikannya, yang menyatakan seseorang telah mencapai standar kompetensi minimal.
 - c) Kualitas APK sangat penting untuk menciptakan lulusan yang kompeten.
 - d) Diusulkan agar indikator peningkatan mutu lulusan di semua jenjang bukan rata-rata UN, melainkan rata-rata kompetensi, sehingga tidak semata-mata berorientasi nilai tetapi dapat menghasilkan lulusan yang kompeten (yang didasarkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Pengupayaan lulusan yang kompeten nantinya akan otomatis berdampak pada penyesuaian sistem pembelajaran, mutu layanan, mutu pembelajaran dan guru.
 - 2) Menanggapi usulan tersebut, berikut beberapa tanggapan:
 - a) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyatakan setuju sepanjang indikator kompetensi dapat diukur, dan hal ini merupakan tantangan bagi Puspendik, Balitbang. Apabila Kemendikbud berhasil menyajikan formula tersebut maka hasil ke publik juga akan sangat baik, sebaliknya, bisa menjadi persoalan baru.
 - b) Kepala Balitbang menyatakan bahwa tidak semua indikator dapat terukur secara nasional, dan penilaian aspek sikap sangat sulit untuk diukur.
 - c) Mendikbud meminta Kepala Balitbang dan Puspendik memikirkan konsep pengukuran indikator tersebut dengan matang.
 - d) Berdasarkan pengalaman menyiapkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah menyampaikan bahwa akses masih merupakan persoalan utama pendidikan di Indonesia. Masih banyak indikator ketercapaian akses yang belum tercapai dikarenakan setiap tahun mengalami keterbatasan anggaran untuk mencapai akses. Oleh karena itu, kualitas dan akses harus tetap dijalankan secara beriringan.
 - 3) Kepala Biro Umum mengusulkan penambahan indikator dalam peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, yakni Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- c. Arahan Mendikbud:
- 1) Mendikbud meminta agar ditambahkan *baseline* pada setiap indikator tahun 2014 dalam penyusunan renstra Kemendikbud.
 - 2) Mendikbud menegaskan kembali bahwa para pimpinan unit utama harus telah menggunakan dua dokumen rekomendasi yang diamanatkan kepada Kemendikbud sebagai terjemahan janji Presiden RI (Pokja Pendidikan Tim Transisi) sebagai rujukan dalam penyusunan renstra. Berdasarkan informasi dari para pimpinan unit utama, rujukan tersebut telah dielaborasi dalam penyusunan renstra unit utama.

- 3) Mendikbud meminta ada penegasan item-item utama yang ingin disampaikan dalam paparan renstra sehingga pembahasan dapat terbatas dan mendalam, sementara item lain dapat dijadikan lampiran. Namun, bahan juga jangan terlalu minim yang nantinya dapat menimbulkan masalah.
 - 4) Terkait dengan substansi dalam renstra, ada tiga komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a) penguatan (*empowerment*) dari para pemangku kepentingan pendidikan, baik guru, kepala sekolah, orang tua, maupun siswa;
 - b) akses dan kualitas/ mutu;
 - c) efektifitas dan integrasi birokrasi pendidikan, baik pemerintah pusat (Kemendikbud), dinas, dan sekolah.
- Hal ini akan dibahas pada agenda pertemuan yang lain.

B. Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester-I BPK RI Tahun 2014

- a. Sekretaris Jenderal melaporkan tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan/IHP Semester I BPK RI Tahun 2014 sebagai berikut:

NO	NAMA ENTITAS	REKOMENDASI		HASIL TINDAK LANJUT		DALAM PROSES	
		JML	NILAI (Rp/US\$)	JML	SELESAI NILAI	JML	NILAI
1	SETJEN	16	9.580.474.807,00	7	9.375.111.354,00	9	205.363.453,00
2	ITJEN	11	-	4	-	7	-
3	PAUDNI	2	-	1	-	1	-
4	DIKDAS	17	615.231.879,20	13	600.442.000,00	4	14.789.879,20
5	DIKMEN	7	1.027.617.293,30	6	1.026.753.501,00	1	863.792,30
6	DIKTI	526	108.946.562.689,08 \$2.273,5	221	65.196.761.201,54	305	43.749.801.487,54 \$2.273,5
7	BALITBANG	12	497.684.964,00	8	460.084.864,00	4	37.600.100,00
8	BADAN BAHASA	17	2.023.127.469,20	9	1.881.775.469,20	8	141.352.000,00
9	BPSDM & PMP	14	44.579.060,00	7	44.579.060,00	7	-
10	KEBUDAYAAN	20	7.628.614.078,05	12	7.614.879.620,05	8	13.734.458,00
Jumlah		642	130.363.892.239,83 \$2.273,5	288	86.200.387.069,79	354	44.163.505.170,04 \$2.273,5
Percentase			100,00%		66,12%		33,88%

- b. Temuan terbesar adalah pada unit Direktorat Jenderal Dikti meliputi temuan status aset tanah, penggerjaan konstruksi yang pada akhir tahun tidak selesai, dan lain-lain.
- c. Mendikbud meminta Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan satu lembar deskripsi/penjelasan atas angka-angka pada ikhtisar IHP BPK RI dan menegaskan poin-poin yang dapat di-highlight.

C. Pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013, Ujian Nasional, BSM, dan KIP

- a. Kepala Balitbang menyampaikan penjelasan mengenai alur kerja implementasi kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, progres persiapan UN 2015, dan *milestone* UN 2015.
- b. Kepala Balitbang menginformasikan bahwa *workshop* akan diadakan pada hari Kamis, 22 Januari 2015 dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam

- perbaikan dokumen kurikulum seperti komunitas dan pengawas pendidikan, untuk mengonfirmasi ketersesuaian hasil diskusi dengan rancangan.
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan paparan mengenai Bantuan Siswa Miskin dan Kartu Indonesia Pintar, serta menyampaikan kesepakatan hasil rapat dengan Menko Kesra agar masing-masing kementerian menyiapkan kartu KIP, KKS, dan KIS, sesuai inpres dan anggaran pencetakan kartu dialokasikan ke masing-masing kementerian. Untuk itu, Mendikbud meminta Dirjen Pendidikan Dasar membuatkan surat kepada Presiden RI mengenai integrasi kartu KIP, KKS dan KIS guna penghematan, paling lambat hari Senin, 19 Januari 2015.
 - d. Kepala PSDMPK dan PMP mengusulkan agar paparan UN dan Kurikulum tidak dijabarkan terlalu teknis, akan tetapi lebih menjelaskan perubahan kebijakan kelulusan pada UN dan alasan perbaikan kurikulum.
 - e. Sesditjen Pendidikan Menengah mengusulkan agar paparan materi UN perlu ditambahkan mengenai motivasi siswa mengingat kebijakan UN bukan penentu kelulusan.
 - f. Arahan Mendikbud:
 - 1) Mendikbud mengusulkan agar istilah "mencegah **disintegrasi bangsa**" sebagai salah satu pemanfaatan hasil UN digantikan menjadi "mencegah **ketimpangan**", karena "ketimpangan" memiliki lebih banyak konsekuensi termasuk memunculkan disintegrasi bangsa.
 - 2) Mendikbud meminta perampingan bahan paparan sehingga lebih efisien. Persiapkan alasan pembagian kategori nilai menjadi 4, dan alasan penentuan angka batas bawah boleh mengulang.
 - 3) Mendikbud meminta adanya keterangan untuk menjelaskan predikat hasil ujian nasional "sangat baik", "baik", "cukup", dan "kurang".
 - 4) Mendikbud meminta Kepala Balitbang untuk merampingkan materi Ujian Nasional agar lebih efektif dan efisien.
 - 5) Mendikbud meminta disiapkan tanggapan atas beberapa pertanyaan dasar yang mungkin akan dibahas dalam raker, yakni:
 - a) alasan perubahan K-13 ke KTSP (kurikulum 2006) pada pertengahan tahun;
 - b) keberlanjutan penerapan K-13 pada sekolah yang telah menggunakannya selama 3 semester;
 - c) bentuk dukungan pemerintah terhadap sekolah yang masih melanjutkan K-13;
 - d) langkah-langkah yang dilakukan dalam menyikapi dana yang telah dikeluarkan untuk pembelian buku K-13;
 - e) pelatihan guru yang telah dilakukan.
 - 6) Mendikbud meminta adanya gambaran besar evaluasi dan implementasi kurikulum, *roadmap* rencana UN dan penjelasan penunjang.

D. Posisi Pemerintah terhadap Keberlanjutan RUU Kebudayaan dan RUU Sistem Perbukuan

- a. Dirjen Kebudayaan menyampaikan bahwa RUU seharusnya mengatur pengelolaan kebudayaan, bukan kebudayaan.
- b. Sekretaris Jenderal mengusulkan agar sekolah tidak terkukung dengan industri perbukuan sehingga harga buku dapat lebih murah dan terjangkau.
- c. Mendikbud meminta Dirjen Kebudayaan untuk menyiapkan draf RUU mengenai pengelolaan kebudayaan.

E. Arahan Umum Mendikbud:

- a. Mendikbud meminta para pimpinan utama membuatkan paparan dengan 2 *slide* awal yang menjelaskan *overall issue* (untuk setiap topik pembahasan, khususnya kurikulum dan UN), kemudian detailnya. Ringkas informasi mengenai renstra (fokus 5 tahun).
- b. Proses perampungan bahan paparan adalah sebagai berikut:
 - 1) Rampungkan bahan paparan dan selesaikan Sabtu siang, dan diterima oleh Mendikbud sebelum pukul 12.00 WIB;
 - 2) apabila Mendikbud membutuhkan data tambahan atau memberikan koreksi, informasi akan disampaikan pada hari Minggu pagi (para pimpinan unit utama diminta *standby*);
 - 3) tambahan data atau revisi dikirimkan pada Minggu sore;
 - 4) semua data telah terkumpul dan final pada Minggu malam;
 - 5) bahan paparan telah siap cetak pada Senin pagi.

2. Lain-Lain

- a. Terkait teknis pengumpulan bahan, bahan telah dikirimkan ke Setjen pada Minggu pagi, agar dapat segera dirapikan sebelum diserahkan ke Mendikbud.
- b. Mendikbud meminta daftar 6.221 sekolah yang menerapkan K-13. Data yang telah siap agar segera disampaikan ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk diintegrasikan ke Dapodik.
- c. Rapim selanjutnya dijadwalkan pada hari Selasa, 27 Januari 2014 dan Ditjen PAUDNI akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara rapat, agenda rapim akan segera disusulkan.

